

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA  
PANDEMI COVID -19 DI KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN  
SOPPENG**

oleh:

**ANDI ASWIRATHUL RAHMA**

105641111517



05/05/2021

↑ cap  
Emb. Alumni

R/053/IPM/21.c0

RAH

1'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0172/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 30 April 2021.



Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

### Penguji

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (Ketua)
2. Dra. Hj. ST. Nurmaeta, MM
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP



## PERSETUJUAN

Judul Skripsi :Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan  
Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di  
Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Nama : Andi Aswirathul Rahma

Nim : 10564111517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

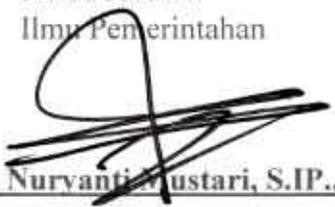
  
Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Intsmuh Makassar

  
Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Asirathul Rahma

Nomor Stambuk : 105641111517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 12 Maret 2021

Yang menyatakan

  
Andi Aswirathul Rahma

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Muhdar dan Ibunda Hernawati selaku orang tua atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengejar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Ayahanda Rudi Hardi,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing 1 dan Ayahanda Ahmad Taufik,S.IP.,M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini .

3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan, support dan ilmunya dari perkuliahan sampai penyelesaian studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Prof.Dr.H. Ambo Asse, M.ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Ayahanda Handam, S.IP.,M.Si, Pembimbing akademik saya
7. Dosen-dosen, Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya.
8. Teman-teman IP Angkatan 017 yang selalu membantu dalam skripsi ini.

Seluruh kalangan yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya KPU tempat dimana saya meneliti semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt sebagai amal ibadah, Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 11 Maret 2021

Penulis,

  
A. Aswifathul Rahma

## Abstrak

**ANDI ASWIRATHUL RAHMA (2021). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng .(Di bimbing oleh Rudi Hardi dan Ahmad Taufik).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan juga untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kecamatan Lilirilau Kabupaten.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dari empat indikator yaitu (1) Status Sosial dan Ekonomi, dimana status sosial dalam pilkada bukan suatu alasan yang menjadikan masyarakat untuk berpartisipasi begitu pula ekonomi. (2) Situasi, keikutsertaan masyarakat pada pemilihan terutama cuaca pada saat hari pemilihan yang paling signifikan sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi berbeda dengan pandemi covid-19 tidak terlalu signifikan pada partisipasi politik masyarakat. (3) Kesadaran politik, dari segi kesadaran politik masyarakat mulai paham mengenai pentingnya berpartisipasi memilih pemimpin disamping itu terkait dengan kesadaran politik KPU selalu mensosialisasikan masyarakat untuk selalu ikut berpartisipasi dalam pilkada sebagai warga negara yang baik. (4) Kepercayaan terhadap pemerintah, dalam hal ini mengenai visi misi dan latar belakang juga pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak tentu semuanya tidak berjalan mulus sesuai dengan yang dipikirkan. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat sehingga masyarakat ikut dan tidak ikut berpartisipasi. Adapun faktor pendukungnya yaitu kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah, adapun faktor penghambatnya yaitu cuaca, perantau dan covid-19.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pilkada, Covid-19

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	iii
Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Konsep Partisipasi .....	9
C. Konsep Partisipasi Politik Masyarakat .....	14
D. Konsep Pemilihan Kepala Daerah.....	18
E. Kerangka Pikir .....	21
F. Fokus Penelitian.....	22
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	25
B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Soppeng.....	33
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng.....	34
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Wilayah Kecamatan Lilirilau .....	35
Tabel 4.4 Perbandingan Persentase Pemilih.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	23
Gambar 4.1 Struktur Komisioner KPU Kabupaten Soppeng .....	37



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan memilih jalan pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau parlemen menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya. (Miriam, 2008).

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah bahwasannya yang lebih tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik itu. Oleh karena itu, keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau yang mempengaruhi hidupnya. Salah satu wadah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur partisipasi politik masyarakat adalah pelaksanaan pilkada serentak. (Repi, 2015).

Salah satu bentuk partisipasi politik pada zaman demokrasi ini adalah pilkada serentak untuk turut memberikan hak pilih sebagai warga negara. Agenda Politik nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan system politik Indonesia adalah

pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat terutama di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. (Prayudi, 2017).

Pilkada serentak di Indonesia ini merupakan koreksi dari pilkada sebelumnya yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD. Keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpin di daerah masing-masing berawal di tahun 2005 ketika bangsa Indonesia memulai era baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Pada tahun pilkada 2020 jumlah ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota sedangkan di Sulawesi Selatan sendiri terdiri dari 12 kabupaten. Pilkada ini merupakan pilkada serentak transisional tahap pertama dari tiga tahap secara nasional dan direncanakan berlangsung pada 2024. (Prayudi, 2017).

Pemilihan Kepala Daerah sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Sedangkan pilkada langsung serentak dijalankan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berbeda halnya dengan pilkada pada saat pandemic yang mengacu pada Surat Keputusan KPU No.: 179/PL.02-kpt/01/ KPU/III/2020, Pilkada Serentak 2020 ditunda, kemudian muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). (Wasisto, 2020).

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat karena pada saat pemilihan kepala daerah itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara. (Usfinit, 2014). Menurut Miriam Budiarmo bahwa kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen (Miriam, 2008). Dari penjelasan ini bisa dikatakan bahwa bentuk partisipasinya termasuk dalam pola konvensional, dimana bentuk konvensional lebih kepada hal-hal umum yang lazim ditemui pada saat pelaksanaan pilkada terutama pada masa pandemi.

Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi berpotensi membawa implikasi demokratis. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menyikapi dengan prakondisi yang tepat. Faktor yang berkaitan dengan perubahan mendasar yang terjadi terutama yang menyangkut dengan pemilihan kepala daerah telah membuat terjadinya dinamika pada partisipasi politik masyarakat pada masa pandemi, sehingga dengan fenomena ini yang menarik untuk diteliti adalah apakah dengan kondisi yang terjadi saat ini pada masa pandemi memberikan implikasi cukup signifikan terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020 baik itu cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik atau justru sebaliknya. (Repi, 2015).

Pada penyelenggaraan pemilu 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Kecamatan Lilirilau tercatat daftar pemilih tetap dengan jumlah sebanyak 29.756 dengan persentase penggunaan hak pilih sebanyak 81,37 persen dengan jumlah

kemasyarakatan dan hukum dalam meninjau kadar demokrasi di masyarakat yang dilihat berdasarkan tingkat partisipasi politik.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat pemahaman bahwa perlunya keterlibatan secara politis meliputi aktivitas masyarakat untuk dapat memperoleh hak politik mereka baik dalam pembangunan dan demokrasi sebagai sarana pengambilan pendapat yang menjadi ciri utama demokrasi dalam pilkada.



diantisipasi oleh seluruh elemen. Sehubungan itu ada prakondisi atas beberapa pemetaan implikasi yang dapat muncul terhadap penyelenggaraannya di lapangan. kesesuaiannya dengan substansi pemilu demokratis terbaik adalah dengan melibatkan partisipasi pemilih yang tinggi dan sekaligus otonom kesadaran politiknya sebagai pemegang kedaulatan. KPU harus berupaya meningkatkan kapasitas promosinya untuk meyakinkan publik bahwa pilkada serentak 2020 aman dari potensi penularan covid-19. Persamaan dari penelitian ini yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokus kepada pemetaan, implikasi dan pelanggaran pada pilkada.

3. Yustinus Usfinit, dkk. 2014. Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang. Penelitian yang dilakukan ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perspektif partisipasi politik masyarakat pada pilkada dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk partisipasi secara konvensional hal ini terlihat dari hasil penelitiannya. Adapun persamaan dari penelitian saya yaitu bentuk partisipasi yang digunakan dan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, adapun perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian ini terfokus pada perspektifnya partisipasi politik sedangkan penelitian saya terfokus pada partisipasi politik masyarakatnya pada masa pandemi.

## B. Konsep Partisipasi

### 1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam proses politik. Partisipasi Masyarakat merupakan keikutsertaan warga negara dalam politik tidak hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinannya, melainkan juga ikut memilih dalam penentuan pimpinannya (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum) dan masih banyak lagi. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia menerangkan bahwa partisipasi adalah ikut serta dalam suatu kegiatan, kegiatan itu bisa bersifat formal maupun informal. (Fadhil, 2013).

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam

suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.(Liando,2016).

Menurut UNDP Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah), LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi yang dilakukan warga Negara tidak hanya pada tahapan implementasi/pelaksanaan, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan/formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain. (Meyliana, 2020).

## 2. Prinsip-prinsip Partisipasi

7. Self-management, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (learning process) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian. (Li & Partisipasi, 2009).

Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya. Partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberatif*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi. (Fadhil, 2013).

### C. Konsep Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, membayar pajak, melaksanakan keutusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksana suatu kebijakan umum, dan mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. (Surbakti, 2003).

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan memilih jalan pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum mengadakan hubungan atau lobbiving dengan pejabat pemerintah atau parlemen menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya. (Miriam, 2008).

Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik. (Sholihin, 2014).

#### 1. Modernisasi

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional) melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

#### 2. Pengaruh-pengaruh struktur kelas sosial

Pelaksanaan pilkada dengan desain penataan pemilu Indonesia secara keseluruhan. Khususnya terkait keberadaan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 soal konstitusionalitas model keserentakan pemilu. Supaya tak tambal sulam, dalam menentukan jadwal dan tahapan pilkada pasca penundaan mestinya juga disimulasikan agar sinkron dengan skema penjadwalan pemilu serentak yang akan dipilih sebagai pelaksanaan Putusan MK dimaksud. Jika memperhitungkan waktu, anggaran, situasi sosial masyarakat, dan akhir masa jabatan kepala daerah, maka lebih memungkinkan penyelenggaraan pilkada dilakukan setelah Juni 2021. Hal ini mempertimbangkan bahwa harus ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan setelah konsentrasi penuh pada penanganan Covid-19, memastikan ketersediaan anggaran di tengah proses pemulihan ekonomi yang pasti terdampak wabah korona, serta memperhitungkan agar posisi kepala daerah tidak terlalu lama mengalami kekosongan. (Nuryanti et al., 2020).

Selain itu ,demi efektivitas dan efisiensi, pilkada 2021 mestinya diselenggarakan bagi semua daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya (AMJ) pada 2021 sampai dengan Juli 2022. Sementara untuk daerah-daerah yang AMJ kepala daerahnya setelah Juli 2022 sampai 2024, tetap diselenggarakan pilkada pada 2022 atau paling lambat awal 2023. Skema pilkada serentak secara nasional pada November 2024 mestinya direkonstruksi ulang, sebab secara beban maupun desain politik, sangat berat bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih karena akan diselenggarakan berbarengan

### Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

#### F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan menggunakan indikator faktor sehingga masyarakat ikut berpartisipasi berdasarkan konsep yaitu, status sosial dan ekonomi, situasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah.

#### G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan ,penulis akan mendeskripsikan indikator dari partisipasi masyarakat:

Kepercayaan kepada pemerintah adalah a.dapat dipercaya dalam pembuatan kebijakan kebijakan, dan dapat dipercaya pada pelaksanaan kebijakan.b.Visi misi dan rekam jejak.



6	Riska Hajriani	RH	Tokoh Organisasi
7	Burhanuddin	B	Tokoh Organisasi

#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli yaitu dari lembaga terkait dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti yaitu Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng. Data yang akan diperoleh berupa hasil wawancara dan informasi yang terkait dengan focus yang dikaji.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti dokumen atau catatan berupa laporan dari lembaga terkait.Data ini merupakan data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang

dikumpulkan .Data yang akan diperoleh berupa hasil dokumentasi dan catatan serta informasi yang terkait dengan focus yang dikaji.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teknik Wawancara**

Teknik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang diambil sebagai sample yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid - 19 Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

##### **2. Teknik Pengamatan/Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah terkait dengan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Penamatan ini bertujuan untuk memperoleh ke akuratan informasi dari informan.

##### **3. Teknik Dokumentasi**

Teknik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah langkah dengan prosedur tahapan tahapan berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

### 2. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

## G. Pengabsahan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan tehnik Triangulasi. Triangulasi menurut Sugiono dalam (Sinatriyo & dkk, 2019).

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun membandingkan hasil wawancara dari responden (Data Primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Triangulasi Teknik

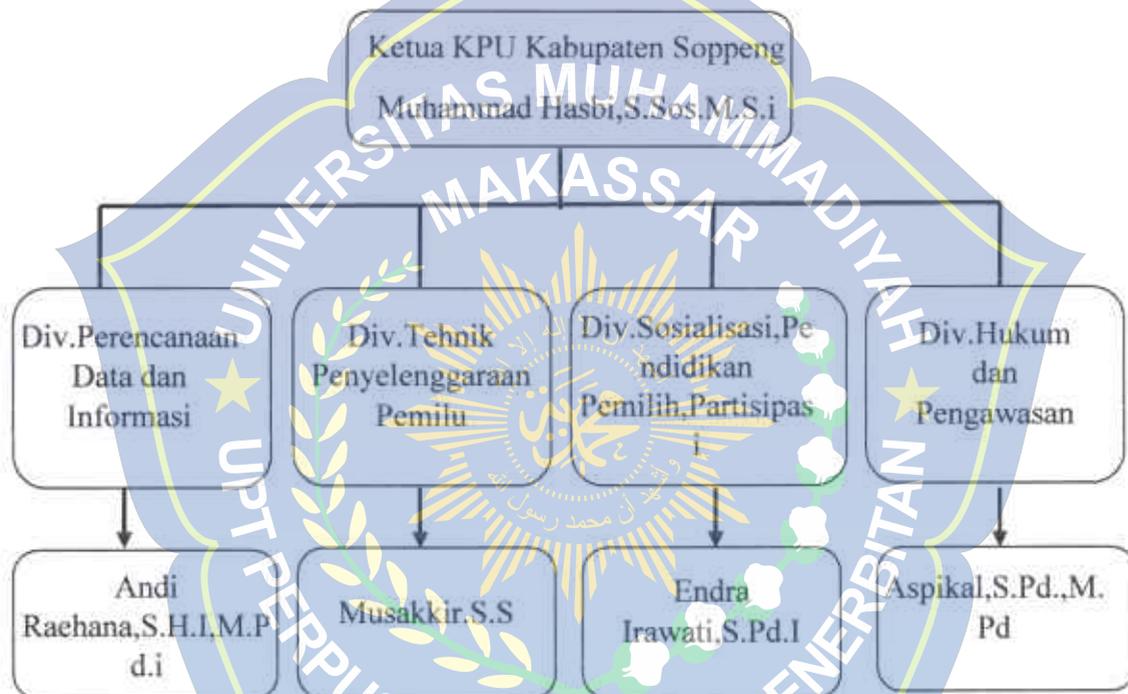
Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.



### Bagan Struktur Komisioner KPU



Gambar 4.1 Struktur Komisioner KPU

#### 8. Ketua KPU

#### 9. Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat memiliki tugas bagaimana mengkoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, memantau supervise, dan evaluasi yang berkaitan dengan kebijakan sosialisasi pemilu, partisipasi politik masyarakat dan pendidikan pemilih.

#### 10. Devisi Data dan Informasi

“Begini,kalau saya pribadi status sosial dan ekonomi dalam hubungannya dengan partisipasi politik masyarakat itu mungkin hanya beberapa oranglah yang mendapat seperti itu karena misalnya saya sebagai masyarakat biasa apa tong mau dijanjikan ka iyyakan seperti itu,tidak sama mungkin halnya dengan pejabat mungkin saja kalau dia yang memilih kemudian diberikan pilihan hal semacam itu mungkin saja dia akan terima dengan pertimbangan pertimbangan ,kan banyak kejadian seperti itu namun kita tidak mengetahui akan hal bersifat seperti itu .kalau saya pribadi mungkin arahnya ke kesadaran politik sebagai kaum yang terdidik” .(Wawancara kepada B ,14 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa Status Sosial dan Ekonomi hanya berlaku pada orang yang memiliki jabatan tertentu sehingga mungkin saja mereka ikut memilih karena ada yang menjadikan alasan sehingga ikut berpartisipasi.

Wawancara kepada Ketua KPU MH yaitu mengenai status sosial dan ekonomi:

“Oke saya paham,kita itu kan penyelenggara kita tidak sampai sejauh itu melayani soal apakah dia kedudukannya apa status ekonominya seperti apa yang kita layani adalah dan yang kita pastikan semua warga negara yang sudah mencukupi umurnya atau memenuhi syarat untuk memilih ya itu kita daftar ,terlepas status sosialnya apa tingkat ekonominya apa gitu.Kita ini kan melaksanakan pilkada kesetaraan ,kita tidak melihat dari kemampuan ekonominya ,sepanjang dia memenuhi syarat,kita tidak sejauh itu mengidentifikasi ,KPU tidak sejauh itu melayani ,KPU tidak,kita inikan namanya proses demokrasi dan penyelenggara ya kesetaraan.KPU hanya memberikan bagaimana masyarakat untuk daaing ke TPS,bagaimana dia dapat menggunakan hak pilihnya, adanya status ekonomi dan sosial atau semacam pengaruh itu hak mereka,yang penting KPU sebagai penyelenggara sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara”(Wawancara kepada MH,26 Februari 2021).

Berdasarkan hasil penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa hubungannya status sosial dan ekonomi yang dalam hal ini jabatan, pekerjaan ,keturunan,dan kekayaan itu akan diberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan begitu pula dengan persoalan misalkan dari segi jabatan jika seseorang memilih karena dijanjikan jabatan ,KPU tidak sampai pada yang seperti itu KPU

hanya berusaha bagaimana mensosialisasikan agar masyarakat tetap ikut berpartisipasi, karena persoalan misalnya jabatan atau pekerjaan mungkin saja hal itu disampaikan secara face to face tanpa memperlihatkan hal itu.

Wawancara kepada EI devisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM yaitu:

“Sama yang dikatakan oleh pak ketua bahwasannya kita tidak sejauh itu, kita sebagai penyelenggara melaksanakan tugas kita masing-masing, tidak sejauh itu. (Wawancara kepada EI, 26 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan dari narasumber dapat disimpulkan bahwa penyelenggara tidak sampai mengakar menyelidiki apa-apa yang menjadi alasan untuk memilih.

## 2. Situasi

Situasi terdiri dari cuaca dan ancaman. Cuaca merupakan keadaan atau kondisi pada saat pilkada. Sedangkan ancaman yang dimaksud adalah hal hal yang akan terjadi pada saat pilkada yang akan mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pilkada terutama dimasa pandemi Covid-19. Berdasarkan Hasil wawancara kepada masyarakat MR yaitu:

“Mengenai situasi pada saat hari H pilkada mungkin kita sudah tahu bersama bahwa cuaca pada saat itu tidak mendukung karena hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah sehingga banyak yang malas untuk ke TPS saya pribadi berhubung TPS agak jauh dengan rumah jadi saya tidak memilih. Kalau faktor ancaman mungkin lebih kepada khawatir karena banyak beredar bahwa kita akan diperiksa jika sudah sampai di TPS sehingga saya berpikir bagaimana jika suhu badan saya diatas normal bisa jadi dikarantina ka. Namun hal itu bisa terpecahkan dengan adanya konfirmasi dari KPU yang kemudian di informasikan kepada penyelenggara bahwa hal itu hanya hoax. (Wawancara kepada MR, 10 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa cuaca pada saat itu menjadi hal yang signifikan sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi karena

Berdasarkan penuturan narasumber bahwa hal yang berbeda terjadi pada saat pilkada serentak di tahun 2020 dimana cuaca yang terjadi berdampingan dengan pandemi covid-19. Tentu ini merupakan hal yang berbeda dari pilkada pilkada sebelumnya.

Wawancara kepada EI selaku Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, yaitu:

“Kalau menurut dari riset yang kemain itu banyak perantau, masuk juga itu yang bencana, itumi kemaarin covid agak aniki, maksudnya tidak komplek bagaimana toh, maksudnya salah satu sih kendala juga tapi bukan itu yang menjadi signifikan atau alasan untuk orang tidak memilih, cuman memang ada segelintir masyarakat ada karena d tps karena ada termogang, ada bilik khusus, jadi masyarakat takut kasian dan beranggapan nanti suhu badan saya di atas 38 derajat maka akan dikarantina, karena ada juga masyarakat yang beranggapan apabila dia panas dia terkonfirmasi covid-19. Karena inikan covid-19 boleh dikata mendunia, cuman beririsan dengan pilkada itu jadi haruski yang mematuhi protokol kesehatan, hujan deras nah pas jam-jam 10 pokoknya waktunya memang orang untuk mencoblos, malahan ada tps yang rubuh karena disertai dengan angin kita bersyukur disini karena kebanyakan tps itu berada dibawah kolom rumah disbanding dengan yang tenda dilapangan ada yang rubuh, dan memang bencana paling besar pengaruhnya” (Wawancara oleh EI, 26 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa cuaca pada saat itu sangat memberikan dampak terhadap partisipasi masyarakat sebenarnya covid-19 ini ini juga memberikan dampak tapi tidak signifikan.

Wawancara kepada MH Ketua KPU Kabupaten Soppeng yaitu:

“Oke ada beberapa variabel sebenarnya terkaait keikutsertaan masyarakat maupun yang tidak ikut pada partisipasi politik tapi kalau ditanyakan pada saat hari H covid itu bukanlah faktornya, kecil itu yang besar adalah faktor cuaca karena dijam jam 8-11 hujan deras itu lebih banyak faktor pemilih itu tidak datang ke tps, pengaruh covid itu saya raa tidak signifikan, ada beberapa variabel lain misalnya yang kami distribusikan fom C itu tidak datang ke tps karena banyak perantau” (Wawancara kepada MH, 26 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan dalam pemilihan ini memang karena keinginan dari masyarakat itu sendiri tanpa ada pengaruh artinya keikutsertaan dalam pemilihan karena kesadaran politik.

Wawancara kepada masyarakat NL yaitu:

“Kalau saya memilih karena sadar akan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara kita harus mengindahkan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPU dimana jauh hari sebelum dilaksanakannya pilkada ini sosialisasi-sosialisasi telah dilaksanakan dan digaungkan agar supaya masyarakat tetap ikut memilih, dari itu bagaimana kita ikut memilih sebagai bentuk penghargaan kita sebagai bentuk partisipasi kita” (Wawancara kepada masyarakat NL, 11 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat yang ikut memilih karena sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai bentuk mengindahkan apa yang telah disampaikan pemerintah dan pihak penyelenggara terkait dengan sosialisasi partisipasi politik masyarakat.

Wawancara yang dilakukan kepada MNU yaitu:

“Untuk memberikan hak suara terkait dengan itu juga tentu juga hal itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang menyepakati adanya pesta demokrasi jadi memilih itu bagian dari pada kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menentukan sebagai pemimpin yang kita amanah kan untuk menjadi pemimpin. Terkait dengan hal itu tentu dibalik juga tentu kami murni memilih tapi tentu kita tahu bahwa background kita pendidikan tentu juga ada pertimbangan kedepannya dengan adanya background pendidikan tentu juga memang menjadi alasan untuk aktif dan ikut memilih karena kami berharap kedepannya pemimpin yang kita pilih kedepannya tentunya ya pemimpin yang bisa memperhatikan khususnya juga dunia pendidikan dan mudah mudahan pemimpin yang dipilih bisa amanah.” (Wawancara kepada MNU, 15 Februari 2021).

semua kita kerahkan selain melaksanakan tugas tugas teknisnya kita juga menunjuk untuk mensosialisasikan tahapan atau mengkampanyekan termasuk hari H itu, semua potensi potensi yang kita miliki kita gunakan baik dari media sosial, media online yah, media cetak ,pertemuan tatap muka, publikasi keliling yah, penyebaran –penyebaran informasi sampai desa kelurahan dan kecamatan dari itulah kemudian yang diterapkan dikecamatan dan kelurahan. Salah satunya membentuk relawan demokrasi yang terdiri dari beberapa basis”(Wawancara kepada MH ,26 Februruari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa yang pertama dilakukan KPU sebagai penyelenggara adalah memaksimalkan potensi yang berkaitan dengan sosialisasi kita ada lebih lima ribu penyelenggara, ada dari KPU, KKPS, PPS dan lainnya itu semua kita kerahkan selain melaksanakan tugas tugas teknisnya mereka juga menunjuk untuk mensosialisasikan tahapan atau mengkampanyekan termasuk hari H itu, semua potensi potensi yang mereka miliki mereka gunakan baik dari media sosial, media online , media cetak , pertemuan tatap muka, publikasi keliling , penyebaran –penyebaran informasi sampai desa kelurahan dan kecamatan dari itulah kemudian yang diterapkan dikecamatan dan kelurahan. Salah satunya membentuk relawan demokrasi yang terdiri dari beberapa basis.

Wawancara kepada EI selaku Devisi – Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat terkait meningkatkan pasrtisipasi politik masyarakat:

“Jadi bentuk sosialisasi kami ini tujuannya bagaimana masyarakat datang memilih ke TPS yang terutama KPU khususnya penyelenggara ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat jadi terkait dengan sosialisasi kemarin kita membentuk relawan demokrasi yang berjumlah 25 orang ini dia menyasar ke basis masing-masing ada basis disabilitas, nitijen yang nitizen itu dia bersosialissi lewat dunia maya, kemudia basis marginal, keagamaan, jadi mereka melakukan sosialisasi itu relawan demokrasi kami pun KPU turun ke masyarakat dengan beberapa basis itu mengumpulkan orang kayak komunitas professional, seperti yang kami lakukan sosialisasi di marioriwawo , kami kumpulkan kepala desa, lurah , tokh agama, toko pendidik, tokoh pemuda, keagamaan itu, jadi metode metode ini

yang kita gunakan sebagai perpanjangan mulut kami kepada masyarakat luas yang tidak bisa kita jangkau, kemudian media sosial yaitu website, facebook, Instagram dan yang paling ini penyebarabrosur brosur kepada masyarakat terutama di hari –hari pasar seperti stiker pamphlet juga publikasi keliling, hal ini kemudian diterapkan pula di kelurahan kecuali pada relawan demokrasi berlaku berdasarkan skala kabupaten” (Wawancara kepada E1, 26 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan oleh narasumber bahwa salah satu upaya yang dilakukan penyelenggara dalam meningkatkan partisipasi politik adalah dengan membentuk relawan demokrasi yang terdiri dari 10 basis.

#### 5. Kepercayaan kepada pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah terdiri dari segi dapat dipercaya dalam pembuatan kebijakan atau dapat dipercaya pada pelaksanaan kebijakan, kedua dapat dilihat dari rekam jeaknya dan visi misi hal tersebut memiliki keterkaitan dimana pembuatan kebijakan harus seiring dengan pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat percaya dengan pemerintah, misalnya saja pemerintah hanya membuat kebijakan namun nihil dalam pelaksanaannya itu sama halnya saja dengan tidak ada. Dalam penyusunan atau pembuatan kebijakan tentunya harus masyarakat paham juga dan mengerti kemana arah kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi atau macam-macam argument yang datang dari masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat MR yaitu:

“Kalau saya melihat dan mendengar visi dan misi saya percaya pemerintah dapat menerapkannya dengan baik begitu pula dengan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.” (Wawancara kepada MR, 10 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa mereka percaya akan pelaksanaan, pembuatan, rekam jejak serta visi misinya.

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat NL:

Wawancara kepada Ketua KPU Kabupaten Soppeng MH yaitu:

“Kalau ditanyakan pada saat hari H nya covid itu bukanlah pengaruhnya kecil yang besar pengaruhnya itu faktor cuaca, jadi lebih kepada faktor cuaca, dan mungkin juga karena itu kan harus mematuhi protokol kesehatan” (Wawancara kepada MH, 26 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa pada saat hari H nya covid itu bukanlah hal yang menjadi penghambat namun faktor cuaca, dan mungkin juga karena harus mematuhi protokol kesehatan, dan faktor pendukungnya itu masyarakat sebagian besar sudah sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Senada yang dikatakan oleh EI selaku divisi sosialisasi, pendidikan, pemilihan, partisipasi masyarakat dan SDM yaitu:

“Kebanyakan masyarakat tidak atau terlambat dalam memilih karena hujan deras nah, memang pada saat itu hujan deras, baru bukan bilang hujan yang sedang tapi hujan deras sekali disertai juga angin dan banyak juga perantau”. (Wawancara kepada EI, 26 Februari 2021).

Pada faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi politik masyarakat ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang akan menghambat masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara seperti yang dikatakan oleh ketua KPU yaitu:

“Ya itu tadi sosialisasi menggunakan segala media yang ada, tatap muka apa segala macam, kita beri ruang kepada kandidat untuk melakukan proses kampanyenya kan itu semua”. (Wawancara kepada MH, 26 Februari 2021).

Wawancara oleh EI yaitu:

“Berbagai upaya yang dilakukan KPU misalnya saja sosialisasi yang dilakukan agar supaya masyarakat tetap ingin ikut memilih, pembentukan relawan misalnya, itu semuanya salah satu upaya kami agar hal-hal yang memungkinkan yang akan menjadi faktor penghambat bisa

terminimalisir ,kalau persoalan output nya itukan,yang penting kita sudah melakkan yang terbaik.(Wawancara EI, 26 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pilkada serentak yaitu yang paling signifikan adalah faktor cuaca yang terjadi pada saat hari H pilkada ,faktor covid-19 namun hal itu bukan yang menjadi faktor signifikan karena pandemi inikan merupakan masalah global yang harus kita lalui bersama ,jadi yang perlu dilakukan hanya mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah,hal itu juga disampaikan penyelenggara dalam hal ini KPU dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020.

## **2.Faktor Penghambat**

Pada saat pelaksanaan pilkada tentu sering terjadi hal-hal yang tidak disangka hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam penyeleggaraannya .Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada masyarakat MR yaitu:

“Kalau faktor penghambatnya dari saya pribadi cuaca pada saat itu tidak mendukung kalau covid-19 itu urutan kesekian kalau mau dijadikan faktor penghambat”.(Wawancara kepada masyarakat MR ,10 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambatnya adalah cuaca yang paling signifikan kalau covid-19 itu tidak terlalu signifikan.

Senada yang disampaikan pula oleh masyarakat NL yaitu:

“yah kalau saya faktor utama pada saat itu atau kendala pada saat pilkada itu ya hujan deras ,kalau masalah covid tidak ada kaitanya kalau saya,itu menurut saya tidak tau yang lain”(Wawancara kepada masyarakat NL 11 Februari 2021).

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa pada saat hari H nya covid itu bukanlah hal yang menjadi penghambat namun faktor cuaca, dan mungkin juga karena harus mematuhi protokol kesehatan, dan faktor pendukungnya itu masyarakat sebagian besar sudah sadar apa yang yang menjadi hak dan kewajibannya.

Senada yang dikatakan oleh EI selaku devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM yaitu:

“Kebanyakan masyarakat tidak atau terlambat dalam memilih karena hujan deras nah, memang pada saat itu hujan deras, baru bukan bilang hujan yang sedang tapi hujan deras sekali disertai juga angin dan banyak juga perantau”. (Wawancara kepada EI, 26 Februari 2021).

Pada faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi politik masyarakat ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi dan meminimalisir terjadinya hal hal yang akan menghambat masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara seperti yang dikatakan oleh ketua KPU yaitu:

“Ya itu tadi sosialisasi menggunakan segala media yang ada, tatap muka apa segala macam, kita beri ruang kepada kandidat untuk melakukan proses kampanyenya kan itu semua”. (Wawancara kepada MH, 26 Februari 2021).

Wawancara oleh EI yaitu:

“Berbagai upaya yang dilakukan KPU misalnya saja sosialisasi yang dilakukan agar supaya masyarakat tetap ingin ikut memilih, pembentukan relawan misalnya, itu semuanya salah satu upaya kami agar hal-hal yang memungkinkan yang akan menjadi faktor penghambat bisa diminimalisir, kalau persoalan output nya itu kan, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. (Wawancara EI, 26 Februari 2021).

## 1. Status Sosial Dan Ekonomi

Berdasarkan hasil dari wawancara beberapa narasumber dalam hal ini masyarakat dan pihak penyelenggara dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng memang bukan karena adanya garis keturunan, bukan karena adanya jabatan yang akan dijanjikan ataupun kaitannya dengan ekonomi seseorang, memang mereka mempunyai minat dan perhatian terhadap politik walaupun kita lihat dari latar belakang yang bukan notabennya mengerti politik tapi mempunyai perhatian politik. Status sosial yang dimaksud adalah status sosial yang berhubungan dengan jabatan, pekerjaan, keturunan seseorang. Dari ketiga itu kita bisa melihat alasan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada masa pandemi covid-19 ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa dari status sosial yang dimaksud ada salah satunya yang menjadikan alasan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, apakah masyarakat itu ikut berpartisipasi karena memiliki garis keturunan atau ada hubungan keluarga, apakah masyarakat memilih karena kedepannya akan dijanjikan jabatan yang lebih baik, apakah masyarakat akan dijanjikan pekerjaan sehingga dia ikut berpartisipasi. Begitupun dengan status ekonomi dalam hal ini tingkat kekayaan seseorang. Maksudnya adalah sering kali kita temukan orang yang berada akan menjadi lebih terhormat dan menjadi titik untuk menarik suara atau hati masyarakat. Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan status sosial dan ekonomi itu diluar dari alasan mereka ikut berpartisipasi. Mereka tidak dijanjikan apapun baik itu berupa jabatan, akan diberikan pekerjaan atau memiliki garis keturunan. Dari hasil

wawancara masyarakat persoalan yang seperti status sosial dan ekonomi itu bukan hal yang diutamakan. Mereka memang mempunyai minat politik atau perhatian kepada politik karena mereka beranggapan dengan kita ikut berpartisipasi kita ikut memilih pemimpin dan siapapun yang terpilih itulah yang akan memimpin kita, jadi tidak ada lagi alasan dan penyesalan kedepannya jika tidak ikut berpartisipasi, apalagi pada masa pandemi ini jika dikaitkan dengan ekonomi maka bisa jadi itu akan mengalihkan perhatian masyarakat namun berdasarkan hasil wawancara juga memang itu diluar dari apa yang menjadi alasan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pilkada serentak dimasa pandemi covid-19.

## 2. Situasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai situasi pada saat hari H pilkada serentak 2020 faktor cuaca yang paling signifikan pada partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi lebih banyak kepada cuaca atau kondisi pada saat pilkada, cuaca pada saat itu sangat tidak mendukung. Situasi yang dimaksud adalah kondisi yang terjadi saat pilkada yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat untuk memilih, misalnya saja cuaca dan ancaman pada saat pilkada. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat bahwasannya yang paling signifikan sehingga masyarakat tidak ikut memilih adalah cuaca pada saat itu. Cuaca pada saat hari H pilkada memang sangat tidak mendukung hujan deras yang mengguyur sehingga menjadikan masyarakat terlambat ikut memilih bahkan ada yang tidak ikut memilih dikarenakan hujan dan tidak sempat. Terlambat dalam hal ini adalah karena pada saat pilkada pada surat panggilan atau form c sudah diberikan jadwal masing-masing sebagai bentuk

dimana memang kita harus ikut berpartisipasi, dan hal hal yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik terutama dimasa pandemi covid-19. Jika kita melihat kesadaran politik memang perlu ditumbuhkan dalam masyarakat ke seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih seperti pada pemilu pemula dan lain lain namun bukan hanya pada pilkada ini tapi pemilu pemilu yang akan datang hal inilah yang harus juga diapresiasi kepada masyarakat yang ikut memilih karena kesadaran politik mereka bukan karena ada gesekan atau pengaruh dari luar yang akan menjadi alasan bagi mereka. Kehadiran masyarakat dalam partisipasi politik ini akan memberikan dampak baik terhadap proses demokrasi kita.

#### 4. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah yang dimaksud disini adalah dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakannya atau dengan visi misi dan rekam jeaknya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat alasan mereka untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak karena ada yang melihat dari segi pembuatan kebijakannya hingga pelaksanaan kebijakannya, dari segi rekam jeaknya mereka percaya dari segi rekam jejak dan visi misi yang telah disampaikan. Dari wawancara ini kita bisa mengetahui pentingnya juga pemerintah membuat dan dan melaksanakan kebijakannya yang sewajarnya jangan hanya melihat dari satu sisi karena dari situlah masyarakat akan menilai seperti apa, begitu pula dengan rekam jejak yang harus baik didepan masyarakat dan visi misi yang disampaikan harus diimplementasikan agar masyarakat dapat terus percaya sehingga bisa mengubah persepi mereka mengenai pemerintah dan politik yang

melewati jadwal yang ditetapkan maka sudah tidak bisa lagi mengikuti pemilihan ,dan mengenai hal tersebut kenapa masyarakat ada yang tidak tepat waktu berdasarkan jadwalnya karena terkendala saat hujan deras. Berbicara mengenai covid-19 itu bukanlah alasan atau hal yang signifikan sehingga masyarakat tidak ikut memilih,karena kita tahu bersama bahwa pandemi ini merupakan bencana nasional yang harus di lewati bersama sehingga yang utama kita harus lakukan yaitu penerapan protokol kesehatan pada saat pemilihan dengan tetap jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dan hal itu sudah diterapkan disemua TPS yang ada di Kecamatan Liliuau.Lain halnya dengan perantau mereka sudah terdaftar menjadi daftar pemilih tetap oleh penyelenggara karena kebanyakan masyarakat yang berada diluar daerah sehingga tidak sempat untuk ikut memilih dan hal itu juga tidak serta merta bahwa dengan tidak adanya masyarakat tersebut diwilayah tempat pemilihan maka harus dihapuskan karena itu merupakan bentuk pelanggaran apabila masyarakat masih terdaftar diwilayah pemilihan namun dengan ketidak hadirannya maka akan dihapus.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada komisioner KPU mengenai upaya atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi –sosialisasi kepada masyarakat baik itu secara tatap muka maupun secara online misalnya saja dalam media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lainnya.Dalam penigkatan partisipasi politik masyarakat KPU juga membentuk relawan demokrasi yang terdiri dari 25 orang

berlaku secara kop kabupaten sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat juga diantaranya:

#### 1. Basis Berkebutuhan Khusus

Basis ini menysasar kepada masyarakat yang berada pada daerah yang tepencil,dan daerah-daerah perbatasan atau kepada penghuni lapas,pekerja kebun yang masih minim dengan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik masyarakat.Sehigga dengan minimnya informasi dan pengetahuan itu menjadikan alasan mereka untuk tidak ikut memilih.

#### 2. Basis Disabilitas

Basis ini menysasar kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan seperti fisik,mental,dan intelektual .Dengan melakukan sosialisasi kepada disabilitas setidaknya mereka telah menganggap bahwa suara –suara disabilitas juga dibutuhkan dala ppemilihan sehingga persepsi mereka tentang disabilitas hanya kaum yang terbelakang itu bisa berubah.

#### 3. Basis Kaegamaan

Basis ini menysasar kepada pemilih yang diorientasikan kepada tokoh tokoh agama mengingat berbagai macam agama yang dianut sehingga perlu adanya kolaborasi antara pihak penyelenggara dengan berbagai cara seperti misalnya berkunjung ke tempat para jamaah,mensosialisasikan pentingnya dalam berpartisipasi tanpa latar belakang agama apapun.

#### 4. Basis Keluarga

Basis ini menysasar kepada unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga ,karena pada akhirnya pun pemilih yang berada pada tengah tengah masyarakat akan kembali kepada keluarga.Misalnya saja sosialisasi kepada ibu-ibu

#### 5. Basis Komunitas

Basis ini menysasar kepada sekelompok orang yang memiliki kepedulian yang lebih.Jika dapat merangkul dan memberikan pemahaman satu atau dua orang kepada anggota komunitas yang memiliki pengaruh dalam komunitas tersebut maka anggota yang lainnya pun akan ebih muda diberikan sosialisasi,misalna sosialisasi pada komunitas bikers.

#### 6. Basis Marginal

Basis marginal menysasar kepada masyarakat yang tidak memiliki akses informasi yang valid serta kepercayaan terhadap diri sendiri sehingga menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak ikut memilih dan juga tidak memiliki suatu dorongan atau semacam motivasi karena mereka seringkali menganggap dirinya tidak memberikan pengaruh terhadap hal yang seperti itu dalam hal ini politik.contoh sosialisasinya adalah sosialisasi pada masyarakat yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata.

#### 7. Basis Nitizen

Basis ini menysasar pada masyarakat yang aktif berkomunikasi pada media sosial misalnya facebook,Instagram,dan media sosial lainnya karena di era yang seperti sekarang ini media sosial juga memberikan pengaruh yang luar biasa ,bisa dikatakan orang yang aktif dimedia sosial tidak akan ada habisnya,sehingga ini menjadikan penyelenggara untuk berinisiatif untuk ikut mesosialisasikan

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu:

Pada pilkada serentak 2020 di Kecamatan Lilirilau menunjukkan adanya angka penurunan pada partisipasi politik masyarakat dengan menurunnya partisipasi politik masyarakat dapat dikatakan kurang efektifnya keikutsertaan masyarakat. Ada pun faktor sehingga masyarakat ikut berpartisipasi yaitu: (1) Status Sosial dan Ekonomi, status sosial meliputi (pekerjaan, jabatan, keturunan) maupun dengan status ekonomi (kekayaan). (2) Situasi terdiri dari cuaca dan ancaman pada saat pelaksanaan pilkada serentak. (3) Kesadaran Politik, pada indikator ini masyarakat yang memilih memang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. (4) Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu percaya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan mereka melihat juga dari segi rekam jejak dan visinya.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam partisipasi politik masyarakat yaitu cuaca, covid-19, dan perantau. Dari ketiga poin tersebut cuaca menjadi faktor yang signifikan dibandingkan dengan covid-19 sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Adapun faktor pendukungnya yaitu kesadaran politik masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan :

1. Bagi penyelenggara untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi walaupun sudah berulang kali disampaikan atau disosialisasikan.
2. Bagi pemerintah agar tetap menjalin hubungan baik agar masyarakat tetap akan percaya dengan pemerintah baik itu dilihat dari segi rekam jejaknya, pembuatan dan pelaksanaan kebijakannya ataupun dengan visinya.
3. Bagi masyarakat agar lebih paham mengenai partisipasi politik, berkaitan dengan kondisi saat itu agar mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi agar tetap ikut memilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, M. S. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 2015 Provinsi Kepulauan Riau Di Kota Tanjung Pinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Universitas Maritim. Vol 2, No 2 Hal.8.
- Akbar, I. (2016). *Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 2, No.1 Hal 4.
- Anggraini, T. (2020). *COVID-19 dan Pemudaan Pilkada : Masalah dan Jalan Keluarnya*. April, Vol.1 No 6, Hal 2.
- Arifulloh, A. (2015). *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei, hal 302.
- Budiarjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chadjiah, S. (2020). *Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 1 Hal.4
- Di, L., Temboan, D., & Langowan, K. (2014). *Merupakan skripsi penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Sam Ratulangi Manado 1*. Vol.1 No. 26 halaman1–26.
- Di, P., & Kotabaru, K. (2013). *pelaksanaan musrenbangkel telah sesuai dengan pedoman dan sasaran yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaannya terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan di kelurahan melalui aktor- aktor masyarakat*. I, vol.1 No.1 halaman 251–262.
- Dwiningrum, S. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fadhil, F. (2013). *Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, No 2 Volume II Edisi 2, Hal.12 .

- Hasibuan, R. P. (2020). *Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid 19*. Adalah: Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1. halaman 121
- liando, D. M. (2016). *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 3 No.2 hal.15
- li, B. A. B., & Literatur, T. (2014). *Indria Septian Kusnaeni, 2014 Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu*. Jurnal UPI. No 1, Vol 1. Hal 12.
- Meyliana, I. F. (2020). *Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tanah Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020*. Jurnal Academia Praja, Vol.3 No 2. Hal 4.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nuryanti, S., Sweinstani, M. K. D., Sorik, S., & Sweinstani, M. K. D. (2020). *Polemik Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal PLP-LIPI. Vol. No 1, Hal 2.
- Prayudi, d. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta Pusat: Inteligencia Intrans.
- Repi, S. G. (2015). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015*. *Jurnal Fisip UNSRAT*, halaman 3.
- Rizki, S. C. (2020). *Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid 19*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 4, No 2 hal 5.
- Rizal, S., & Pratiwi, E. (2019). *Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan Negara Dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Malinau*. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 11–32. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/index>, No.17 hal 2.
- Sholihin, R. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*. Jurnal Administrative Reform,, Vol.2 No.4. hal 6
- Sinatriyo, S. S., & dkk. (2019). *Desain Sistem Informasi Akutansi Berbasis Komputer Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Microsoft*



**Gambar 4: Masyarakat**



Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2021

**Gambar 5: Wawancara dengan Masyarakat**



Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2021

**Gambar 6: Wawancara dengan masyarakat**



**Gambar 8: Wawancara dengan Masyarakat**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021*

**Gambar 8: Wawancara dengan Masyarakat**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021*

## RIWAYAT HIDUP



Andi Aswirathul Rahma, lahir di Kebo pada tanggal 05 April 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Muhdar dan Hernawati. Penulis mulai masuk ke jenjang pendidikan SD pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011 di SD Negeri 114 Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dan pada tahun yang sama masuk ke SMP Negeri 3 Lilirilau dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis masuk ke SMA Negeri 1 Lilirilau dan tamat pada tahun 2017. Kemudian penulis masuk ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2021 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan mendapat gelar S.IP